

## **PENGARUH PROGRAM KELUARGA HARAPAN TERHADAP PEMENUHAN KEBUTUHAN PRAKTIS DAN STRATEGIS GENDER DALAM PERSPEKTIF MOSER**

*The Influence of Program Keluarga Harapan on Meeting Practical and Strategic Gender Needs with the Moser Perspective  
(Case Study: Subdistrict of Margahayu, District of East Bekasi)*

**Erna Ermawati Chotim<sup>1</sup>; Nur Affifah Al Jannah<sup>2</sup>**

Universitas Nasional, Indonesia<sup>1,2</sup>

Email : affifah21@gmail.com<sup>1</sup>; erna.chotim@civitas.unas.ac.id<sup>2</sup>

### **ABSTRAK**

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program pemerintah yang ditujukan untuk pengentasan kemiskinan dan peningkatan SDM di tingkat keluarga. Dalam menjalankan program ini, perempuan menjadi aktor utama dalam pengelolaan bantuan PKH. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Program Keluarga Harapan dengan menggunakan perspektif gender terhadap pembagian peran gender di rumah tangga, pemenuhan kebutuhan praktis dan strategis (akses, kontrol untuk mendapatkan sumberdaya dan manfaat untuk peserta PKH). Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini dianalisis dengan analisis deskriptif kualitatif dan mengacu pada Analisis Gender dari Caroline Moser. Temuan yang diperoleh dari penelitian ini adalah: (1) Pada pembagian kerja gender, perempuan masih mengalami beban yang berlebih dibandingkan dengan laki-laki; (2) Program Keluarga Harapan telah mampu memenuhi kebutuhan praktis yang mencakup pada aspek pendidikan dan kesehatan, tapi belum pada peningkatan pendapatan rumah tangga; (3) Pada kebutuhan strategis, akses dan kontrol dalam mengelola sumberdaya sudah cukup setara. Namun untuk peningkatan kapasitas perempuan belum mencapai pada kesadaran dan kesempatan untuk memiliki akses dalam peningkatan kemampuan di bidang ekonomi dan politik.

Kata Kunci: PKH, Perempuan, Kebutuhan Praktis Gender, Kebutuhan Strategis Gender.

### **PENDAHULUAN**

Salah satu masalah terbesar yang dimiliki Indonesia adalah kemiskinan, masalah ini termasuk masalah yang dihadapi dunia setelah sekian lama dan berulang kali terjadi dan sulit dihapuskan. Berdasarkan data dari BPS masyarakat miskin di Indonesia pada Maret 2019 9,41%, menurun 0,25% pada bulan September 2019 dan menurun 0,41% tepat saat awal Maret 2020. Kemudian, jumlah penduduk miskin pada Maret 2020 sebesar 25,14 juta orang, menurun 0,53 juta orang pada bulan September 2020.

Meskipun jumlah penduduk miskin di Indonesia mulai berkurang, menghapuskan kemiskinan menjadi prioritas pemerintah agar seluruh penduduk memperoleh

kesejahteraan melalui program ini (Eliza, 2019). Program ini menjadi salah satu program pemerintah yang diunggulkan karena mampu menekan angka kemiskinan. Pemerintah mengklaim pelaksanaan bantuan sosial berbentuk PKH pada 2017 relatif berhasil (Gumabo, 2021). Rencana baik ini dianggap berhasil karena menghapuskan lebih dari 320 ribu kemiskinan pada tahun 2017 (Azhari, 2020). Salah satu wilayah yang mendapatkan bantuan PKH adalah Kota Bekasi yang notabene nya adalah kota sub-urban dan sebagai penyangga ibu kota dengan banyaknya pendatang menjadikan kota ini menjadikan angka kemiskinan begitu dinamis karena dipicu oleh berbagai faktor (Ihsan 2019).

Kota Bekasi merupakan salah satu kota yang melaksanakan Program Keluarga Harapan (Kota Bekasi terdiri dari 12 Kecamatan, salah satu kecamatan di Bekasi yang mengikuti Program Keluarga Harapan dengan KPM terbanyak adalah Kecamatan Bekasi Timur. Kecamatan Bekasi Timur terdiri dari empat kelurahan yaitu Kelurahan Margahayu, Duren Jaya, Bekasi Jaya dan Aren Jaya. Pada Tahun 2018 Kelurahan Margahayu menduduki posisi pertama penerima PKH terbanyak yaitu 1.242 KK (Purba, 2017). Dengan adanya data tersebut maka dipilihlah Margahayu sebagai lokasi penelitian.

Bantuan dari PKH yaitu berupa uang merupakan salah satu sumber daya baru bagi keluarga penerima manfaat (Rudi, 2020). Dalam pemanfaatan uang tersebut, perempuan dianggap sebagai aktor yang baik dalam pengelolaannya (Susantyo, 2019). Namun, perempuan pada keluarga miskin dianggap sebagai penyangga suami saja dan menjadikan hal ini sebagai ketimpangan peran kerja gender bagi perempuan dan pemenuhan kebutuhan praktis dan strategis harus menjadi suatu hal yang diperhatikan melalui kebijakan pemerintah Program Keluarga Harapan (Nurhaliza, 2020). Padahal hal tersebut merupakan komponen yang penting bagi perempuan dalam mencapai kesetaraan pada rumah tangga nya (Hia, 2021).

Idealnya, perempuan mendapat hak yang terkait akses dan kontrol pada setiap sumber daya yang ada di rumah tangga yang dijalaninya (Yulianti, 2021). Namun pada realitasnya, diperkotaan dan di wilayah pedesaan, masih banyak perempuan yang menjadi penopang ekonomi keluarga (Risqina, 2019). Sebab itu, penghapusan atas diskriminasi harus dilakukan secara luas agar kesetaraan dapat diwujudkan (Septiana, 2021). Jika hal ini berhasil maka perempuan memiliki akses lebih besar terhadap

sumber daya dan dapat mengambil keputusan secara mandiri untuk memanfaatkannya. Berdasarkan permasalahan di atas maka penulis tertarik untuk meneliti mengenai Program Keluarga Harapan hingga timbul pertanyaan: Bagaimana pengaruh Program Keluarga Harapan pada pemenuhan kebutuhan praktis dan strategis pada Keluarga Penerima Manfaat PKH di Kelurahan Margahayu?

## LANDASAN TEORI

### Gender dan Pembangunan

Beberapa jenis pekerjaan yang tercakup dalam isu gender meliputi (reproduktif, produktif, dan pekerjaan sosial-kemasyarakatan) yang dinilai oleh suatu kelompok masyarakat tertentu cenderung berbeda (Razali, 2020). Kesetaraan gender menurut penjabaran dalam Pedoman Pengarusutamaan Gender (PUG) adalah kesamaan hak antara laki-laki dan perempuan, hak tersebut meliputi hak asasi sebagai manusia dan berberbagai hal yang berhubungan dengannya (Lestari, 2020).

Sementara keadilan gender adalah proses untuk mencapai dan menjadi adil antara laki-laki dan perempuan (Santi, 2020). Peran masyarakat menafsirkan gender membentuk keadaan gender di masyarakat, baik keadaan setara dan adil maupun sebaliknya. Ketidakadilan gender merupakan sistem dan struktur dimana baik kaum laki-laki dan perempuan menjadi korban dari sistem tersebut (Fadilah, 2020). Banyaknya isu-isu gender tidak hanya terjadi di masyarakat melainkan juga terjadi pada pelaksanaan program-program pembangunan, masalah tersebut antara lain:

#### Marjinalisasi (peminggiran)

Marjinalisasi perempuan adalah: (1) Penyingkiran perempuan dari pekerjaan produktif; (2) Pemusatan perempuan kepada periferi pasar tenaga kerja; (3) Feminisasi sector yang sangat produktif; dan (4) Tidak adanya kestaraan ekonomi.

#### Subordinasi (penomorduaan)

Subordinasi yaitu kebijakan-kebijakan yang diberikan oleh pihak penyelenggara program dirasakan kurang optimal untuk peserta perempuan, dan sebagian besar disebabkan oleh adanya ideologi patriarki yang berlaku dalam masyarakat tempat mereka tumbuh. Beban kerja berlebih (*over burden*) juga dialami pada kaum perempuan, yaitu adanya anggapan bahwa perempuan tidak bertanggung jawab atas pekerjaan produktif untuk menopang perekonomian keluarga dan hanya dianggap sebatas untuk

membantu suami dan tidak ada apresiasi yang jelas akan kerja yang dilakukan di rumah (Nadyah, 2020).

### **Stigma negatif (stereotype)**

Stigma negatif terhadap perempuan yang memilih jalan berkarir, serta aspek psikologi sosialnya yang dianggap kurang matang. Hal ini tentu sangat buruk akibatnya dalam kehidupan sosial kaum perempuan.

### **Kekerasan**

Kekerasan adalah serangan secara fisik maupun psikis terhadap perempuan dan menyebabkan kerugian pada pihak tertentu (Utaminingsih, 2020). Konsep gender dan pembangunan di Indonesia mengalami pergeseran dari zaman ke zaman. Woman in Development (WID) adalah jawaban untuk menjawab tantangan kemiskinan dan keterbelakangan bangsa-bangsa Dunia Ketiga yang justru mengakibatkan keterbelakangan kaum perempuan. WID mengintegrasikan perempuan dalam pembangunan (Rahmawati, 2020).

### **Teknik Analisis Gender**

Analisis ini mencakup wilayah posisi, kedudukan, dan kebutuhan sumberdaya masing-masing agar memperbaiki keharmonisan hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat. Hal ini berguna untuk membangun hubungan yang harmonis dalam masyarakat antara laki-laki dan perempuan (Rompas, 2020). Pada penelitian ini, penulis menganalisa pada keluarga penerima manfaat, yaitu dari suami, istri dan anak tentang bagaimana pembagian kerja sehari-hari dan penggunaan sumberdaya atau bantuan PKH. Analisis gender juga dapat digunakan pada program kebijakan bantuan sosial oleh pemerintah. Pada penulisan ini akan difokuskan pada implementasi program PKH dalam pengaruhnya terhadap pemenuhan kebutuhan praktis dan strategis (Risidiana, 2020). Penulis akan berfokus dengan menggunakan Model Moser karena pada penelitian sebelumnya belum ada yang melakukan analisa dengan model ini pada Program Keluarga Harapan (Amin, 2020).

### **Model Moser**

Model Moser memiliki beberapa tujuan yang mampu menjadi pisau analisa dalam melihat realita Keluarga Penerima Manfaat PKH di Kelurahan Margahayu. Pada model ini, dinamika akses dan kontrol menjadi poin penting dalam penggunaan sumberdaya

baru, yaitu uang dan beras yang diberikan oleh pemerintah antara keduanya dalam ranah sosio-ekonomi yang jauh berbeda. Komponen analisis teknik Moser adalah:

### **Tiga Peran Gender**

*Peran produktif* berperan dalam *income* yang diperoleh suatu keluarga. *Peran reproduktif* terdiri dari kegiatan rutin seperti perawatan anak, membersihkan rumah, memasak, dll. Pada umumnya kegiatan reproduktif hanya dilakukan oleh perempuan. Beban ganda seperti melekat karena secara implisit perempuan harus melakukan pekerjaan domestik dan publik tanpa kesadaran dari laki-laki (Muhartono, 2020). Dalam penelitian ini penulis mengamati tentang pembagian kerja reproduktif dalam kehidupan sehari-hari. *Peran kegiatan kemasyarakatan atau kegiatan sosial*, yakni kegiatan sosial yang luas dalam kaitannya dengan pengembangan sosial penerima, sereta kebutuhan bersosial dalam lingkungan tempat tinggal (Masadi, 2020).

### **Kebutuhan Praktis**

Kebutuhan Praktis yaitu kebutuhan seperti penyediaan pendidikan, penyediaan pelayanan kesehatan, peningkatan pendapatan dalam rumah tangga, peluang untuk mendapatkan penghasilan dalam mencukupi kebutuhan rumah tangga dan penyediaan kebutuhan rumah.

Pada penelitian ini, penulis mengangkat mengenai pemenuhan kebutuhan KPM PKH dari bantuan tunai untuk pelayanan kesehatan, gizi, dan pendidikan terhadap anak serta peluang ekonomi dari uang bantuan tunai PKH.

### **Kebutuhan Strategis**

Kebutuhan strategis gender terkait posisi dan peran perempuan dan laki-laki dalam masyarakat. Selain itu juga terkait dengan perubahan subordinasi perempuan terhadap laki-laki seperti pembagian kerja, kekuasaan dan kontrol terhadap sumberdaya PKH, termasuk di dalamnya adalah penghapusan kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan. Penelitian ini juga akan melihat mengenai kegiatan P2K2 dalam meningkatkan kapasitas KPM PKH yang diberikan materinya oleh pendamping untuk dijalankan dalam kehidupannya sehari-hari dari segi aspek pengetahuan ekonomi, pola pengasuhan anak, kesehatan gizi dan pendidikan (Irmawati, 2020).

### **Profil Kelurahan Margahayu**

Kelurahan Margahayu adalah salah satu kelurahan di Kota Bekasi yang memiliki luas wilayah yang luas yaitu 465.640 Ha. Luas wilayah Kelurahan ini adalah salah satu yang paling luas dibanding dengan kelurahan lainnya di Bekasi Timur yaitu Aren Jaya, Bekasi Jaya, Duren Jaya. (Lihat Gambar 1)

Kondisi fisik Kelurahan Margahayu ini pada umumnya adalah daerah yang modern dan maju karena didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai. Namun, jika ditelusuri lebih dalam, masih banyak perkampungan padat penduduk dimana warganya tinggal di rumah petakan dan jalannya belum diaspal Harga sewa rumah yang cenderung murah, yakni Rp500.000-Rp700.000 per bulan menjadi daya tarik warga untuk tinggal disana.

Di Bekasi Timur peringkat pertama diduduki oleh Kelurahan Duren Jaya dengan jumlah penduduk 36.588 orang, kemudian diikuti oleh Kelurahan Margahayu yaitu 33.953 orang, lalu Kelurahan Aren Jaya 32.132 orang dan Kelurahan Bekasi Jaya yang memiliki jumlah penduduk paling sedikit yaitu 31.969 orang.

Kelurahan Margahayu merupakan salah satu dari empat kelurahan di wilayah Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi yang terdiri dari 26 Rukun Warga (RW) dan 166 Rukun Tetangga (RT). Kepadatan penduduk dalam sebuah wilayah berkaitan dengan taraf hidup penduduknya dan hal itu berkaitan erat dengan kemiskinan.

Berdasarkan UU Nomor 13/2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin bahwa seluruh program Penanganan Fakir Miskin mengacu pada BDT dikelola oleh Kementerian Sosial. Untuk jumlah penduduk miskin menurut Rekap Basis Data Terpadu tahun Januari 2019 per kelurahan di Kecamatan Bekasi Timur, Kelurahan Margahayu mendapati tempat paling tinggi yaitu 3.519 KRT (Kepala Rumah Tangga) dan 12.978 jiwa.

Data Tabel 1 melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, menyebutkan bahwa pekerjaan yang dimiliki oleh warga Kelurahan Margahayu paling banyak adalah karyawan swasta 14.652 orang. Kemudian diikuti oleh pengurus rumah tangga 11.870 orang, lalu PNS sebanyak 1.366 orang, buruh lepas sebanyak 840 orang dan terakhir pedagang 442 orang. Sisanya 8.529 orang merupakan campuran dari berbagai profesi yang dibagi dalam 89 kategori pekerjaan yang telah ditentukan.

### **Program Keluarga Harapan**

PKH membuka sebuah kanal bagi keluarga rawan sosial-ekonomi agar memperoleh fasilitas pendidikan, kesehatan, dan fasilitas sosial lainnya. Selain itu, program ini juga menjangkau penyandang disabilitas agar mendapatkan hak-haknya sebagai warga negara yang merdeka (Taufik, 2020).

### **Sasaran Keluarga Penerima Manfaat**

Keluarga Penerima Manfaat adalah kelompok yang berhak mendapatkan bantuan PKH dengan beberapa kriteria tertentu. Ada tiga jenis komponen yang mendapatkan bantuan yaitu komponen kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial dengan beberapa fasilitas sesuai dengan kriterianya masing-masing. Nilai bantuan sosial PKH dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Pada tahun 2007 mencapai Rp. 187 ribu/bulan/keluarga. Pada tahun 2014 bantuan dari pemerintah adalah sebesar 5,6 triliun. Kemudian naik pada tahun 2015 yaitu 6,5 triliun. Pada tahun 2018 bantuan sosial meningkat tajam yaitu 19,4 triliun dan diprediksikan sampai akhir tahun 2019 nanti penyaluran bantuan akan sampai pada angka 34,4 triliun.

Skema bantuan PKH berbeda-beda pada setiap kategori yaitu sebagai berikut: (Lihat Tabel 2)

Semua bantuan di atas diberikan secara bertahap sebanyak empat kali yaitu pada bulan Januari, April, Juli, Oktober dan Desember. Pada kategori kesehatan untuk balita, pendidikan untuk anak sekolah jenjang SD, SMP dan SMA.

Pada Kelurahan Margahayu terdapat peningkatan persentase penerima manfaat PKH dari tahun ke tahun. Tahun 2012 adalah awal program ini diimplementasikan di Kota Bekasi. Kelurahan Margahayu menjadi salah satu kelurahan yang mendapatkan giliran awal dengan jumlah penerima manfaat 310 jiwa. Semakin bertambah pada tahun 2013 menjadi 325 jiwa. Kenaikan terjadi secara signifikan pada tahun 2017 menjadi 781 jiwa hingga pada tahun 2018 berjumlah 1242 jiwa.

### **Pendamping PKH**

Pendamping PKH yang ditugaskan di Margahayu terdiri dari tiga orang yaitu Dharma, Alif dan Subagja atau biasa dipanggil Jeje. Mereka sudah cukup lama menjadi pendamping di Kelurahan Margahayu. Pada setiap pendamping, mendapatkan tugas untuk memegang beberapa angkatan yang dibantu oleh ketua kelompok untuk beberapa hal yang bersifat administratif (Husuna, 2020).

Bapak Dharma (29 Tahun) memegang anggota yang mulai menerima PKH pada tahun 2015, 2016, 2018. Kemudian Bapak Alif (35 Tahun) mengurus anggota PKH angkatan 2012 dan Bapak Jeje (30 Tahun) angkatan 2016. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir kekeliruan dalam pemutakhiran atau verifikasi data apabila ada perubahan data dari KPM. Contohnya seperti kalau ada tahun ini yang salah satu anak dari KPM yang naik tingkat dari SD ke SMP maka semua itu harus dilaporkan dan diverifikasi karena jumlah bantuan pun akan berubah.

### **Ketua Kelompok**

Ketua kelompok adalah individu yang didelegasikan oleh pendamping atau anggota PKH pada setiap RW yang bertugas untuk membantu segala kegiatan yang bersifat administratif dan non-administratif.

Tugas yang bersifat administratif adalah apabila jadwal penuruan dana atau beras yang disebut BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) telah diberitahu oleh pendamping maka dengan segera ketua kelompok akan menginformasikannya ke para anggota melalui aplikasi pesan singkat WhatsApp. Untuk pembagian beras, ketua kelompok juga harus mengambil di satu titik yang telah ditentukan oleh pendamping setiap bulannya menggunakan truk sewaan, sepeda motor atau becak.

Penetapan ketua kelompok pada satu wilayah dapat ditempuh dengan tiga cara. Pertama, dipilih secara aklamasi atau jika ada salah satu anggota yang menawarkan diri tanpa paksaan. Kedua, ditunjuk langsung oleh anggota. Ketiga, ditunjuk langsung oleh pendamping. Jika sudah ada yang dipilih, selanjutnya ketua kelompok terpilih akan diberi pemahaman yang lebih dalam tentang PKH oleh pendamping.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Karakteristik KPM PKH di Kelurahan Margahayu**

#### **Tempat Tinggal**

Kategori tempat tinggal responden terdiri dari dua klasifikasi, yaitu: (1) milik sendiri dan (2) sewa/kontrak. Pada KPM yang telah menjadi anggota PKH sejak awal tahun 2012 merupakan warga yang tinggal di Kota Bekasi sejak tahun 1970-1980.

Kategori kepemilikan rumah yang berikutnya adalah sewa atau kontrak. Rentang waktu mengontrak dimulai dari 2 sampai 10 tahun dengan harga sewa Rp500.000-Rp700.000. Ciri lainnya yaitu berpindah-pindah dari RT satu ke RT yang lain dengan



lokasi kelurahan yang sama. Hal ini didorong dengan faktor yaitu jarak yang strategis dan preferensi harga sewa yang murah pada wilayah RW tertentu.

### **Status Pekerjaan**

Pekerjaan yang dimiliki oleh penerima manfaat PKH di Kelurahan Margahayu adalah pekerjaan yang tidak harus memiliki tingkat keterampilan dan pendidikan yang tinggi. Pekerjaan formal maupun informal yang dimiliki oleh laki-laki atau suami merupakan dampak dari minimnya pendidikan yang telah ditempuh. Beberapa contoh profesinya adalah sebagai Office Boy, pedagang kecil, buruh lepas harian (buruh bangunan), security, tukang ojek, montir bengkel atau serabutan. Dengan pendapatan yang minim dan tidak tetap inilah yang menjadi salah satu indikator kemiskinan bagi para KPM untuk mendapatkan bantuan sosial PKH.

Untuk perempuan atau istri, menjadi ibu rumah tangga adalah karakteristik utama pada anggota penerima bantuan PKH. Mengurus kebutuhan rumah, anak dan suami adalah kegiatan sehari-hari yang dilakukan di rumah. Namun ada beberapa perempuan yang memiliki pekerjaan sampingan untuk membantu suami dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

### **Tingkat Pendidikan**

Pada kategori pertama adalah istri rendah – suami rendah adalah sama-sama tamatan SD. Namun untuk anak-anaknya sebagian besar adalah sedang atau sudah lulus SMA/K. Pendidikan yang rendah juga berkaitan dengan pekerjaan yang dimiliki. Sebagai tamatan SD, KPM PKH berprofesi sebagai pedagang kecil dan buruh bangunan dengan penghasilan yang tidak menentu.

Kategori kedua, salah satu pihak lebih tinggi (tingkat pendidikan istri tidak sama dengan suami) jarang ditemukan. Dengan tingkat pendidikan suami lebih tinggi yaitu lulusan SMA, pekerjaan yang dimiliki memiliki gaji yang tetap seperti menjadi *security*.

### **Pembagian Kerja Gender**

#### **Kegiatan Produktif**

Kategori yang paling mendominasi adalah suami–istri sama-sama berkontribusi dalam rumah tangga (menghasilkan uang). Jenis pekerjaan KPM PKH cenderung homogen, yaitu buruh bangunan, pedagang kecil, tukang ojek dan serabutan (suami) serta buruh cuci, buruh *home industry* dan Pembantu Rumah Tangga/PRT (istri).

#### *Kegiatan Reproduksi*

Perempuan mendominasi dalam melakukan pekerjaan domestik tersebut. Hal ini terjadi karena perempuan cenderung lebih sering tidak melakukan kegiatan diluar dan fokus pada rumah tangga saat memperoleh dana PKH. Ketika informan memperoleh dana PKH, pembagian kerja dengan suami tidak ada perubahan. Namun kegiatan yang membutuhkan tanggung jawab bersama pada ranah domestik cenderung lebih baik dan positif.

### **Kegiatan Kemasyarakatan**

. Kegiatan arisan pada setiap ketua kelompok PKH rutin diadakan setiap satu bulan sekali. Posyandu rutin dihadiri oleh ibu-ibu yang memiliki balita untuk penimbangan berat badan bayi dan pemberian vitamin A setiap bulannya, dan PKK dominan dikerjakan oleh perempuan. Kemudian kegiatan P2K2 juga secara implisit hanya disasarkan untuk kaum perempuan saja tanpa adanya partisipasi dari laki-laki. Umumnya perempuan penerima PKH tidak memiliki komunitas diluar dari lingkungan RW atau KPM PKH lainnya, karena waktu mereka cenderung hanya untuk rumah tangga saja.

Pada kegiatan sosial kemasyarakatan, kegiatan cenderung lebih banyak dilakukan oleh ibu-ibu yang berkaitan dengan keluarga. Seperti arisan yang menggu nakan uang belanja dan apabila mendapat giliran menang maka uang tersebut akan kembali dialokasikan untuk keperluan rumah tangga.

### **Pemenuhan Kebutuhan Praktis**

Kebutuhan ini meliputi beberapa aspek, yaitu (1) pendidikan, (2) penyediaan pelayanan kesehatan, dan (3) peningkatan pendapatan dan kebutuhan rumah tangga.

### **Aspek Pendidikan**

Aspek pelayanan pendidikan cukup memberikan pengaruh pada Keluarga Penerima Manfaat untuk menyekolahkan anak-anaknya. Dana yang diberikan cukup meringankan beban orang tua dalam kebutuhan yang harus dikeluarkan setahun dua kali seperti buku dan seragam. Motivasi terbesar para keluarga pada umumnya adalah menginginkan adanya perbaikan nasib pada anak di masa depan. Pembagian kerja pada aspek pendidikan ini lebih banyak dilakukan oleh istri. Istri yang melakukan kegiatan mengambil dana bantuan pendidikan dari PKH, menjemput anak sekolah, datang ke sekolah untuk mengambil buku laporan sekolah dan membeli baju seragam di pasar atau koperasi sekolah sedangkan suami hanya sekadar mengantar anak sekolah.

### **Aspek Kesehatan**

Dana PKH yang didapatkan untuk aspek kesehatan adalah Rp2.400.000,00 per tahun atau Rp600.000,00 per tiga bulan. Pelaksanaan penimbangan berat badan dan Vitamin A di Kelurahan Margahayu dibagi pada beberapa unit pelayanan posyandu dengan persyaratan harus melaporkan progress kesehatan anak dengan buku KMS kepada pendamping.

Setiap mendapatkan dana PKH, Ibu NK yang anaknya berumur 5 tahun, mengalokasikan dana untuk membeli susu formula, makanan sehat seperti buah-buahan, daging dan sayur-mayur. Uang yang masih sisa terkadang dialokasikan yang tidak menyangkut dengan aspek kesehatan seperti membeli keperluan rumah tangga dan membayar uang sekolah di PAUD Rp100.000,00/bulan. Perempuan mengambil peran penting untuk memantau kesehatan dan anaknya ke Posyandu. Ibu-ibu peserta PKH juga berperan aktif di lingkungan RT dan Posyandu hal itu merupakan kunci utama dalam mencapai keberhasilan pada aspek kesehatan. Dalam hal ini, PKH relatif memberikan pengaruh yang signifikan dengan pantauan dari ketua kelompok dan pendamping.

### **Aspek Peningkatan Pendapatan dan Kebutuhan Rumah Tangga**

Program Keluarga Harapan secara eksplisit tidak memberikan bantuan dana yang ditujukan untuk kebutuhan sehari-hari. PKH hanya memberikan dana untuk aspek pendidikan, kesehatan, lansia dan penyandang disabilitas. Namun pada kenyataan di lapangan, perempuan penerima manfaat PKH juga menyisihkan dana yang didapat untuk kebutuhan rumah tangga seperti untuk modal usaha, membeli sembako, pulsa listrik, membayar hutang, dsb.

Pada pemenuhan peningkatan pendapatan dan kebutuhan rumah tangga semua bergantung pada keputusan KPM dalam mengalokasikan dana dengan syarat wajib kebutuhan anak harus dipenuhi terlebih dahulu. Kemudian bantuan beras cukup membantu dalam menekan anggaran pengeluaran KPM dalam memenuhi kebutuhan beras mencapai 50%. Faktor pendamping yang intens melakukan pemantauan kepada KPM PKH turut menjadi faktor pendukung pada keberhasilan aspek-aspek tersebut.

### **Pemenuhan Kebutuhan Strategis**

Pada penelitian ini, akan dibahas (1) akses, (2) kontrol dan (3) manfaat peserta KPM terkait sumberdaya dari Program Keluarga Harapan.

### *Akses*

Akses adalah peluang atau kesempatan yang dimiliki oleh Keluarga Penerima Manfaat dalam memperoleh sumberdaya. Sumberdaya yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bantuan uang, beras dan kegiatan P2K2 (Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga). Dalam penelitian ini, akses yang dimiliki untuk mendapatkan bantuan cenderung lebih besar dimiliki perempuan dibanding dengan laki-laki. Perempuan harus ambil sendiri dengan menggesek ATM. Dalam penyaluran bantuan dana dan beras, ketua kelompok memiliki andil besar karena mereka yang bertanggungjawab atas tersalurkannya bantuan tersebut.

### **Kontrol**

yang dimaksud adalah tentang cara pengambilan keputusan pada pengelolaan dana untuk pendidikan, kesehatan dan rumah tangga. Tipe beriktunya adalah tipe pengambilan keputusan yang hanya dilakukan oleh suami dan istri. Hal ini didorong oleh istri yang menganggap bahwa suami adalah pemimpin keluarga, sistem patriarki masih terasa kental dan istri harus mendapatkan masukan dari suaminya dalam mengelola keuangan dari PKH. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu IS:

“Kita selalu putusin bareng-bareng mba, ngurus keuangan buat anak juga sama-sama. Lagian kan anak cuma satu, perhatian kita juga sama dia doang kan. Anak sekolah kita juga yang pantau bareng-bareng”

### **Manfaat**

Manfaat yang diberikan oleh PKH bukan hanya materi namun juga ada non-materi. Pada segi sosial PKH melaksanakan P2K2 atau Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga. P2K2 adalah pertemuan yang dilakukan minimal satu bulan sekali. Manfaat P2K2 yang dirasakan oleh peserta PKH tidak sesuai tujuan PKH (memberikan pemahaman tentang materi). Adanya beban ganda perempuan yang harus ditanggung yaitu menghadiri P2K2 serta mengurus anak. Justru manfaat yang paling dirasakan adalah manfaat sosial seperti mampu menjalin silaturahmi, bisa mengenal dengan sesama komunitas. Hal yang berkaitan langsung dengan perempuannya sendiri antara lain bisa menambah pemahaman tentang Modul P2K2.

Pada segi ekonomi, hanya sedikit perempuan yang dapat merasakan peningkatan pendapatan dengan kemampuannya dari bantuan Program Keluarga Harapan. Hal ini dikarenakan mayoritas KPM adalah kelompok sosial yang miskin dan sulit dalam

memenuhi kebutuhan dasar sehingga bantuan PKH hanya difokuskan untuk kepentingan pendidikan dan kesehatan anak.

Kemudian pada segi politik atau kesempatan menjadi pemimpin di komunitas tidak dapat didapatkan pada anggota biasa melainkan dirasakan oleh ketua kelompok. Berdasarkan observasi di lapangan, ketua kelompok adalah orang yang diandalkan pada satu wilayah RW. Hal ini menjadikan individu tersebut memiliki kemampuan berkomunikasi dan memiliki komunitas baru pada sesama ketua kelompok. Manfaat politik ini juga didukung karena adanya kesadaran dalam membuka akses politik, seperti menjadi kader posyandu atau PKK.

### KESIMPULAN

Di Kelurahan Margahayu Program Keluarga Harapan telah mampu memenuhi kebutuhan praktis. Kebutuhan praktis yang dimaksud mencakup aspek pendidikan, kesehatan, dan pendapatan rumah tangga. Berdasarkan hasil wawancara, aspek kesehatan adalah aspek yang sangat diraskan manfaatnya hal ini didorong oleh kewajiban pembayaran iuran, uang jajan, dan pembelian alat-alat sekolah dan seragam setiap tahunnya. Aspek kesehatan tidak begitu dirasakan karena tidak ada kewajiban membayar sesuatu sehingga sisa dana dapat dialokasikan untuk kebutuhan anak yang lain seperti untuk membeli makanan yang bergizi. Terakhir, pada peningkatan pendapatan rumah tangga, hanya sebagian kecil KPM PKH yang mampu memanfaatkan sisa dana untuk modal usaha atau mobilitas vertikal. Hal ini disebabkan oleh minimnya pendapatan rata-rata KPM PKH sehingga lebih didahulukan kebutuhan rumah tangga seperti makan sehari-hari.

Pada aspek kebutuhan strategis, akses yang dimiliki perempuan dalam mendapatkan bantuan dana PKH sudah sangat tinggi. Hal ini disebabkan oleh adanya kartu anggota PKH yang mewajibkan perempuan mengambil dana bantuan. Pada aspek kontrol, kendali yang atau kuasa yang dimiliki oleh perempuan dan laki-laki dalam membuat keputusan mengenai pemanfaatan dana dan simpanan cenderung seimbang. Namun, masih ada perempuan yang tidak memiliki kontrol dan dalam memutuskan alokasi dana harus sesuai dengan izin suami. Manfaat yang diterima oleh KPM PKH dalam segi materi (uang dan beras) cukup membantu dan meringankan beban rumah tangga. Tetapi untuk peningkatan kapasitas KPM melalui kegiatan P2K2 cenderung

kurang berhasil karena minimnya jadwal pertemuan dan suasana pada saat kegiatan berlangsung kurang kondusif.

Dalam penelitian ini, penulis menilai bahwa PKH mengasumsikan ketika kebutuhan keluarga terpenuhi (anak dan suami) maka kebutuhan isteri juga terpenuhi. Padahal berdasarkan hasil wawancara tidak. Perempuan tidak bisa membeli kebutuhan pribadi karena harus mendahulukan keperluan rumah tangga. Pada aspek peningkatan kapasitas kebutuhan strategis perempuan hanya sampai pada level mendapatkan pengetahuan (materi pada modul P2K2) dan mengerti secara sadar akan praktik yang harus dilaksanakan. Namun pencapaian belum berhasil pada tingkat peningkatan kemampuan perempuan sebagai individu baik dalam aspek ekonomi dan politik.

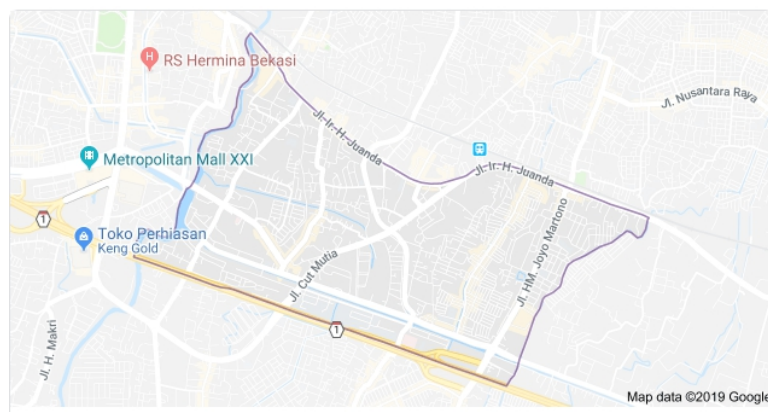
#### DAFTAR PUSTAKA

- Amin, M. (2020). *Pengaruh Penerapan E-Faktur dan E-SPT PPN terhadap Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak dengan Gender Sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar).
- Azhari, I. (2020). *Implementasi Permensos No. 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan Ditinjau Dari Prsepektif Imam Al-Mawardi (Studi Kasus Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara).
- Eliza, R. (2019). *Pengaruh Program Keluarga Harapan (Pkh) Terhadap Kesejahteraan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).
- Fadilah, A. S. (2020). *Hubungan Tingkat Kesejahteraan Keluarga Penerima Program Keluarga Harapan Dengan Status Gizi Anak Usia Dini Di Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang* (Doctoral dissertation, Universitas Negeri Semarang).
- Gumabo, A. (2021). Peran Pendamping Program Keluarga Harapan Dalam Verifikasi Dan Pemutakhiran Data (Studi di Kecamatan Siau Timur, Kabupaten Siau Tagulandang Biaro). *Jurnal Politico*, 10(4), 147-161.
- Habibi, A. (2020). *Sosialisasi Dan Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan Di Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil* (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry).
- Hia, E. N., Siagian, M., & Achmad, N. (2021). Implementasi Family Development Session Program Keluarga Harapan. *PERSPEKTIF*, 10(1), 128-139.
- Husuna, F., Sondakh, S. J., & Wasak, M. P. (2020). Peran Gender Pada Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Nelayan Di Desa Bulawan Induk Kecamatan Kotabunan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. *AKULTURASI: Jurnal Ilmiah Agrobisnis Perikanan*, 7(2), 1343-1354.

- Ihsan, M. A. (2019). Pemberdayaan Perempuan Dalam Masyarakat Konserfatif. *Musawa: Journal for Gender Studies*, 11(1), 14-33.
- Irmawati, L. (2020). *Pengaruh Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar).
- Lestari, R. W., & Talkah, A. (2020). Analisis Pengaruh Bantuan Sosial Pkh Terhadap Kesejahteraan Masyarakat PKH Di Kecamatan Pangungrejo Kabupaten Blitar. *Revitalisasi: Jurnal Ilmu Manajemen*, 9(2), 229-241.
- Lestari, R. W., & Talkah, A. (2020). Analisis Pengaruh Bantuan Sosial Pkh Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Pkh Di Kecamatan Pangungrejo Kabupaten Blitar. *REVITALISASI: Jurnal Ilmu Manajemen*, 9(2), 229-241.
- Masadi, E. P. (2020). *Pengarusutamaan Gender Dalam Birokrasi (Studi Tentang Kesetaraan Gender Bagi Aparatur Sipil Negara Dalam Rekrutmen Pejabat Struktural di Pemerintah Kota Surabaya)* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS AIRLANGGA).
- Muhartono, D. S. (2020). Pentingnya regulasi pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah di Kabupaten Kediri. *Jurnal PUBLICIANA*, 13(2), 117-134.
- Nadyah, N., & Afiif, A. (2020). Gender Dalam Keluarga Berencana (Studi Kasus Partisipasi Suami Dalam Melakukan Kontrasepsi Di Kelurahan Macanre Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng). *Jurnal Sipakalebbi*, 4(1), 332-345.
- Nurhaliza, N., Kasir, K. I., & Kusnadi, D. (2020). *Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Kasiro Ilir Kecamatan Batang Asai Kabupaten Sarolangun* (Doctoral dissertation, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi).
- Purba, C. B., & Primayoga, K. (2017). Pengaruh Motivasi dan Kohesivitas Kelompok Terhadap Kinerja Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kota Bekasi. *Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis*, 3(02), 179.
- Rahmawati, R. (2020). Implementasi Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014 Tentang Penyetaraan Gender dan Peranan Perempuan Dalam Pembangunan Desa. *Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan (JIASK)*, 2(2), 16-35.
- Razali, M. T., & Putri, M. D. (2020). Evaluasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Desa Sungai Asam Kecamatan Belat Kabupaten Karimun Tahun 2018. *Jurnal Kemunting*, 1(1), 58-83.
- Risdiana, F. Y. (2020). Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk Perempuan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia. *ENTITA: Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial dan Ilmu-Ilmu Sosial*, 2(2), 257-270.
- Risqiana, E. (2019). *Dampak Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Keluarga Miskin di Kabupaten Pekalongan (Studi Kasus di Kecamatan Wonopringgo)* (Doctoral dissertation, Universitas Negeri Semarang).
- Rompas, F. C. M., Kawung, E. J., & Goni, S. Y. (2020). Tingkat Kesadaran Asn Terhadap Peran Gender Di Sekretariat Wilayah Kota Manado. *HOLISTIK, Journal Of Social and Culture*, 2(4), 36-65.

- Rudi Hanafi, H. (2020). *Upaya Program Keluarga Harapan Dalam Mengentaskan Kemiskinan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Di Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan* (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).
- Santi, E., & Pinem, M. (2020) Analisis Pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Desa Bandar Sono Kecamatan Nibung Hangus Kabupaten Batu Bara. *JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 12(1), 75-82.
- Santi, N., & Afdalli, M. (2020). Aspek-Aspek Dalam Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong (Studi Kasus Pada Desa Binturu dan Desa Masintan). *Al'iidara Balad*, 2(1), 39-51.
- Septiana, M. (2021). *Makna Keluarga Sakinah Dalam Novel Hati Suhita Karya Khilma Anis (Kajian Psikologi Sastra Perspektif Abraham Maslow)* (Doctoral dissertation, IAIN Purwokerto).
- Susantyo, B., & Nainggolan, T. (2019). Integrasi Penanggulangan Kemiskinan Melalui Program Keluarga Harapan. *Quantum: Jurnal Ilmiah Kesejahteraan Sosial*, 14(2), 73-84.
- Taufik, F. R. (2020). *Analisis gender terhadap ilustrasi teks dan ilustrasi gambar dalam buku pelajaran bidang Studi Akidah Akhlak MTS kelas IX Penerbit Kementerian Agama tahun 2016* (Doctoral dissertation, Sunan Ampel State Islamic University).
- Utaminingsih, A., Ulfah, I. F., & Lestari, S. (2020). *Feminisasi Kemiskinan dan Pemberdayaan Perempuan Berperspektif Psikologis*. Malang: Universitas Brawijaya Press.
- Yulianti, R. D. (2021). *Pengaruh Positioning, Daya Tarik Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Wisatawan Dalam Perspektif Syariah Pada Wisata Edukasi Kampung Coklat Blitar* (Doctoral dissertation, IAIN Tulungagung).

## GAMBAR DAN TABEL



Gambar 1. Peta Kelurahan Margahayu



Tabel 1: Profil Penduduk Kelurahan Margahayu

No.	Nama Kelurahan	KRT (Kepala Rumah Tangga)	Jiwa
1.	Aren Jaya	3.099	11.889
2.	Bekasi Jaya	3.095	11.525
3.	Duren Jaya	2.739	10.098
4.	Margahayu	3.519	12.798

Tabel 2: Skema Bantuan PKH

Uraian	Jumlah Bantuan
Bantuan Tetap Reguler	Rp550.000
Kesehatan	Rp2.400.000
Pendidikan SD	Rp900.000
Pendidikan SMP	Rp1.500.000
Pendidikan SMA	Rp2.000.000
Lanjut Usia	Rp2.400.000
Penyandang Disabilitas	Rp2.400.000

*Sumber: Modul Kebijakan dan Pengetahuan Tentang PKH 2021*